



Peningkatan Perizinan Bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Provinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Madiun dan Kabupaten Gresik

Dwi Putranto Riau^{1*}, Ridho Harta¹, Bambang Agus Diana¹

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

*Korespondensi: dwiputranto@ecampus.ut.ac.id

Info Artikel

Diterima 25
Januari 2023

Disetujui 11
April 2023

Dipublikasikan 04
Mei 2023

Keywords:
SIMBG; PBG; SLF;
Implementasi

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perizinan Bangunan Gedung sebelum dibangun adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sebelum dimanfaatkan adalah Sertifikat laik fungsi (SLF). Dalam proses perizinan bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang berbasis WEB agar prosesnya berjalan cepat, transparan serta terintegrasi dengan perizinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SIMBG dalam proses perizinan PBG dan SLF di Kota Madiun dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan informan dari Penentu kebijakan penyelenggara perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Teknis Bangunan Gedung. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Forum Group Discussion (FGD) dan data sekunder melalui textbook, jurnal, massmedia, website. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menghasilkan pelaksanaan SIMBG yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dan kabupaten Gresik adalah pelayanan system hybrid yaitu pelayanan secara online dan offline dengan mendampingi masyarakat untuk memenuhi syarat gambar teknis. Membuka pelayanan klinik SIMBG bagi masyarakat yang kurang menguasai teknologi informasi digital dan peningkatan kapasitas organisasi dengan meningkatkan SDM, Struktur Birokrasi, komunikasi dan koordinasi serta disposisi dalam menyelesaikan permohonan perizinan bangunan Gedung.

Abstract

A building permit before construction is a Building Approval (PBG) and before being utilized is a Certificate of Proper Function (SLF). Building permits through the WEB-based Building Management Information System (SIMBG) is fast, transparent, and integrated with other licenses. This study aims to determine and analyze the implementation of SIMBG in the PBG and SLF licensing processes in Madiun City and Gresik Regency, East Java Province. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach with informants from policymakers who administer licensing, namely the One Stop Investment and Licensing Service (DPMPTSP) and the Building Technical Service. Data collection through in-depth interviews, Forum Group Discussion (FGD), and secondary data through textbooks, journals, mass media, and websites. Data analysis through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The research resulted in the implementation of SIMBG carried out by the Municipal Government of Madiun City and Gresik Regency, namely a hybrid system service, namely online and offline services by assisting the community in fulfilling technical drawing requirements. Opening SIMBG clinic services for people who lack digital information technology skills and increasing organizational capacity by improving human resources, bureaucratic structures, communication, and coordination, as well as dispositions in completing building permit applications.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan Gedung bahwa pelayanan perizinan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan terintegrasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (D. W. I. P. Riau et al., 2022).

Implementasi Kebijakan SIMBG melibatkan dua institusi yaitu DPMPSTP dan DPUPR yang dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi atas tujuan kebijakan dan hubungan dengan institusi lain. Kondisi ini akan memunculkan berbagai masalah seperti: masalah komunikasi dan informasi; masalah koordinasi; dan konflik yang mengacu pada perbedaan interpretasi tentang tujuan kebijakannya (Maynard-Moody, Dennis Palumbo, Michael Musheno, 1990). Dalam Implementasi PBG dan SLF pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia umumnya baru melaksanakan PBG, sebagian kecil sudah melaksanakan SLF dan banyak yang belum melaksanakan karena berbagai hambatan factor internal dan eksternal (Purnamasari, 2020; D. P. Riau & Yuswadi, 2014).

Implementasi Kebijakan menurut Perssman dan Wildasvsky diartikan sebagai melaksanakan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfil*), untuk menghasilkan keluaran seperti yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) dan untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Van Meter dan Horn (1978) mendefinisikan Implementasi "*Policy Implementation encompasses those action by public or private individuals (or group) that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*" (Purwanto, 2012). Pada saat ini Pemerintah sudah menerapkan *e-government* atau *open government*. *Open Government* merupakan suatu konsep yang menuntut keterbukaan atau transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Tantangan bagi pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana penerapan e-Gov ini dapat meningkatkan secara maksimal kegunaannya sehingga nantinya dapat memberikan efek positif terhadap bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (Raziqin et al., n.d.).

Sistem informasi adalah komponen manusia, teknologi informasi, dan metode kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan. (Pradana, 2016). Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja bisnis sangat bergantung pada bagaimana bisnis tersebut mengelola informasi dan menjadikannya lebih lengkap dengan sistem manajemen informasi yang baik (Fajri & Arnie, 2015). Dalam meningkatkan

pelayanan publik menurut Stomatas (1996) tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pelayanan publik yang disebutkan oleh Jiptono (Tjiptono, 1997). Kualitas pelayanan publik didefinisikan sebagai sistem manajemen yang strategis dan terintegrasi di mana semua manajer dan karyawan berpartisipasi dan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk terus meningkatkan proses organisasi untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Pergeseran paradigma ini tidak hanya terjadi pada alur atau struktur pemikiran pelaku penyedia layanan, tetapi juga terjadi pada tataran realitas, seperti struktur organisasi, sistem tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya organisasi (Bambang Istianto, 2011; Studi et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh AUFARUL MAROM (2020) tentang *Performance Analysis of IMB (Building Permit) Licensing Services in the Capital Investment Service and Integrated Service of One Door and Labor of Pekalongan Regency*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian kinerja pelayanan perizinan IMB serta faktor apa saja yang menghambat dan mendorong keberhasilan pencapaian kinerjanya. Warga yang akan membangun gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada DPMPSTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2019, diantara 2.742 urusan perizinan, Non Usaha 2.251 (82,09%) diantaranya merupakan pengurusan perizinan IMB. Porsi bidang perizinan IMB yang besar ini menuntut kinerja yang optimal dari aparatur yang menanganinya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Aspek yang akan dipelajari meliputi Visi dan Misi, pemberdayaan karyawan, fleksibilitas dan adaptasi dengan kondisi baru, komunikasi dengan pihak terkait mengenai kinerja organisasi, menentukan hasil yang ingin dicapai dan fokus pada pencapaian keberhasilan, dan kompetisi untuk meningkatkan kinerja (Marom, 2021).

Penelitian oleh Relinda Pupitasari (2022) tentang kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Gedung Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peristiwa atau sesuatu yang berbeda, yaitu. hasil pada ekspektasi dan persepsi pengguna, artinya variabel ekspektasi berbeda dibandingkan sebelum *customer* menggunakan aplikasi, sedangkan persepsi (pengalaman) terjadi setelah pengguna menggunakan aplikasi SIMBG. (Studi et al., 2022).

Penelitian Isma Nuryana Ismail (2021) tentang Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Properti Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui efektivitas sistem informasi manajemen properti untuk pelayanan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas situs sistem informasi manajemen gedung untuk pelayanan izin mendirikan bangunan tidak efektif. Hal ini disebabkan terlalu banyak persyaratan saat mengajukan izin mendirikan bangunan (ISMAIL, 2021). Dalam penelitian ini adalah implementasi SIMBG di Kota Madiun dan Kabupaten Gresik dengan meneliti pelayanan SIMBG dengan menganalisis komunikasi, struktur birokrasi, Sumberdaya, Sistem Informasi, koordinasi antar dua Dinas pada DPMPSTSP dan DPUPR. Hasil penelitian ini diharapkan pelayanan implementasi SIMBG berjalan meningkat. Di Kota Madiun pelaksanaannya SIMBG versi kedua dan Kabupaten Gresik sebagai permulaan dari manual ke system online digital. Struktur organisasi SIMBG sudah terlaksana

dan terbentuk Sekretariat SIMBG, Klinik SIMBG, TPA, TPT dan pemohon pelayanan PBG dan SLF bisa dilayani secara cepat dengan melalui SIMBG.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada implementasi SIMBG di Kota Madiun dan Kabupaten Gresik. Metode kualitatif masih berdasarkan data berupa teks dan dokumen, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan berasal dari strategi penelitian yang berbeda (Sari, 2020). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang telah disusun sebelumnya. Hasil wawancara tersebut merupakan data dasar yang diperoleh dari subyek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara terstruktur dengan tema dan topik yang Telah Ditetapkan Wawancara dilakukan melalui pengisian kuesioner dan forum diskusi kelompok (FGD) yang dipimpin moderator.

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yaitu Reduksi data adalah proses memilih, menyelaraskan, memperhatikan, mengabstraksi, dan mentransfer data mentah dari lapangan. Presentasi informatif adalah kumpulan informasi terstruktur yang dibuat untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini data direduksi dan disajikan sebagai cerita berupa informasi tentang isu politik Kota Madiun dan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Analisis data kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) manual data and procedure analysis (MDAP), yaitu analisis data kualitatif secara manual, dan *analisis prosedur* (MDAP), adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara manual, dan (2) *data analysis procedure by aplecation* (DAPA), yaitu analisis data menggunakan alat bantu aplikasi media yang dibuat khusus untuk menganalisis data kualitatif (Bungin, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Peraturan bangunan gedung di Kabupaten Gresik dan Kota Madiun dalam proses perda dan Peraturan Kepala Daerah disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Peraturan Bangunan Gedung yang sudah ada didaerah Studi

Pemda Kab/Kota	Perda Bangunan Gedung	Perda Reribusi PBG	Perbub/Perwali ttg TPA	Perda/Perwali Ttg TPT
Kabupaten Gresik	Proses	Proses	Kep. Bupati no 050/37/HK/437.12/2021 Tentang SIMBG	Kep. Bupati no 050/224/HK/437.12/2021 Tentang TPA, TPT dan Penilik Dalam SIMBG
Kota Madiun	Proses	Proses	Keputusan Walikota Madiun no. 640/401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim bidang Ahli Bangunan Gedung	Keputusan Kapala Dinas PUPR no 640/401.110/1501/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis

Sumber: Dinas PU Kab Gresik dan Kota Madiun, 2022

Status pelaksanaan PBG melalui SIMBG di daerah prioritas dengan keterangan yaitu : 1). Dari 9.112 pengajuan PBG, hanya terdapat 230 PBG yang sudah terbit (2.52 %) dan 9 pengajuan yang ditolak (0.10 %). Masih terdapat 8.873 PBG (97.89%) yang masih dalam proses.2). sebanyak 24 kab/kota. Rincian penjelasan disajikan Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Status Pelaksanaan PBG melalui SIMBG

Dinas	Proses	Jumlah Perizinan	(%)
Dinas Teknis BG	Kelengkapan Dokumen	7362	80.79
	Konsultasi	916	10.05
	Retribusi	231	2.54
	Pembayaran	364	3.99
Dinas Perizinan	Validasi Pembayaran	0	0.00
	Terbit	230	2.52
	Di Tolak	9	0.10
Total Permohonan Perizinan		9.112	

Sumber: (Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR), 2022

Proses percepatan penerbitan PBG penting diikuti pemilik akun SIMBG yaitu Akun Dinas Teknis (akun Kepala Dinas Teknis, akun Pengawas (Kabid/Kasi), akun operator); Akun DPMPTSP (akun Kepala Dinas Teknis, akun Pengawas (Kabid/Kasi), akun operator) dan akun pemohon. Tugas dari Institusi/perorangan di SIMBG yaitu: 1. Dinas menerbitkan PBG, SLF, SKBG dan RTB; input calon TPA dari SK TABG/TPA; menetapkan calon TPA yang ditugasi di Kab/Kota; menugaskan TPA. 2. Melakukan pendaftaran dan mengajukan PBG, SLF dan RTB. 3. Verifikator melakukan verifikator calon TPA. 4. Calon TPA melakukan pendaftaran, Follow up penugasan, memantau jadwal penugasan dan 4. Pusat melaksanakan penyelenggaraan BG Fungsi Khusus, melakukan rekap data TPA secara nasional, melakukan pemebinaan dan pengawasan pelaksanaan TPA.

Berdasarkan hasil informasi dari pejabat fungsional bangunan Gedung kota dan kabupaten di Kabupaten Gresik dan Kota Madiun tentang penerbitan PBG dan SLF Pasca SIMBG diberlakukan setelah tanggal 1 Agustus 2021 disajikan Tabel 3 Berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Penerbitan PBG dan SLF di Kabupaten Gresik dan Kota Madiun

Pemda Kab/Kota	PBG	SLF
Kabupaten Gresik	Manual	170
Kota Madiun	On (Retribusi Rp.0)	2 (DPMPTSP)

Sumber: Dinas Teknis BG (Kab Gresik; Kota Probolinggo; Kota Madiun dan Kota Kediri), 2022

3.2 Pembahasan

Pembahasan sesuai dengan teori Edward III (1980) dan Van Meter dan Van Horn (1975) dan teori implementasi kebijakan lainnya dan Hasil wawancara yang diisi melalui kuisioner dan Forum Group Diskusi (FGD) terhadap penyelenggara perizinan bangunan Gedung di DPMTSP dan DPUPR Kota Madiun dan Kabupaten Gresik dengan hasil sebagai berikut:

Koordinasi

Pembagian tugas pelaksanaan SIMBG antara PUPR dan DPMPTSP termasuk antara kepala bidangnya sudah sesuai dengan PP 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung termasuk antara kepala Bidang/Koordinator dengan Subkoordinator dan staf; Peran Koordinator dan Subkoordinator dalam implementasi SIMBG sudah sesuai dengan struktur tugas dan fungsi Peran. Dalam pelaksanaan SIMBG jika terdapat kendala baik dari sisi sistem SIMBG maupun verifikasi dokumen, operator selalu berkoordinasi dengan pengawas; masalah-masalah implementasi SIMBG sudah diperbaiki secara bertahap dan dioptimalkan pelayanannya kepada masyarakat, salah satunya dengan dibukanya klinik konsultasi kepada pemohon mendapatkan informasi sebelum mengupload berkas ke SIMBG (Zukhri & Putranto, 2022).

Koordinasi antara dua organisasi dan antara organisasi dengan unsur masyarakat (TPA) tidaklah mudah, sebagaimana O'Toole dan Monjoy (1984:492) "Jika penegakan pada dasarnya adalah masalah kerja sama, insentif apa yang dapat diberikan kepada individu, baik lembaga tunggal atau ganda, untuk bekerja sama menuju kebijakan bersama" (L.J. dan R.S. M. O'Toole, 1984) O'Toole dan Monjoe (1984) mengusulkan bahwa proses koordinasi bekerja dengan baik dengan tiga peristiwa, yaitu: Kekuasaan, Kepentingan Bersama, dan Berbagi Ketiga faktor ini dapat menghubungkan koordinasi antar organisasi yang berbeda. (Monjoy, 1984) (Sugiartha et al., 2021).

Koordinasi antara DPMPTSP dan DPRP mengikuti teori Hall dan O'Toole (Jr) (2000) bahwa suatu instansi berkoordinasi dengan bidang kekuasaan dan kewenangan langsung (Studi et al., 2022).

Komunikasi

Sosialisasi SIMBG sering dilakukan melalui media massa dan tatap muka dengan pemerintah kota/kab. melalui DPMPTSP dan DPUPKP; Permohonan PBG telah diajukan setelah konstruksi selesai, diperlukan SLF melalui SIMBG online, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, Pemerintah Koto/kab. dalam pelaksanaan PBG dan Pengukuhan Fungsi Bangunan (SLF) secara online tidak dipungut biaya dan masa berlaku izin sesuai dengan SOP; Hingga saat ini, SIMBG online telah membebani pemerintah kota/kabupaten dengan implementasi PBG dan SLF, sektor publik/swasta dengan persyaratan yang sulit seperti gambar bangunan, pernyataan rencana kota (KRK) dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Persyaratan PBG, ada persyaratan yang menjadi kendala, terutama persyaratan layanan teknis, seperti Dokumen lingkungan UKL/UPL dan Peil Banjir harus disiapkan oleh konsultan dengan SKA tingkat menengah (Sugiartha et al., 2021).

Kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh lima hal, yaitu: a) layanan bisnis pengguna jasa; b) bertindak sebagai mekanisme "bicara" c) adanya birokrat yang berpedoman pada keperluan masyarakat pengguna layanan; d) Menciptakan budaya pelayanan dalam lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan perizinan; e) Pelaksanaan sistem pelayanan yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat pengguna layanan. (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005). Menurut Operator SIMBG Kota Madiun: " Sistem aplikasi yg belum stabil; Pihak pemohon yang tidak mengerti teknis gambar/perhitungan sehingga pada saat pengajuan PBG prosesnya lebih lama dikarenakan menunggu hasil revisi dari Tim Tekns

/Konsultan; Pihak pemohon yang kurang mengerti terkait teknologi /computer dikarenakan pengajuan PBG sekarang dilakukan secara online; Sistem PBG secara teknis sudah terstruktur namun saat ini RTDR Kota Madiun masih dalam proses sehingga KRK tidak dapat diterbitkan. Solusinya untuk sementara menggunakan "surat Pernyataan /mandiri" untuk fungsi hunian, sedangkan fungsi usaha menggunakan "kesesuaian tata ruang" dari oss.go.id.

Pelayanan SIMBG

Dari pemohon pengajuan PBG dan SLF melalui DPMPSTSP Kabupaten Gresik: "Pengajuan PBG dan SLF langsung melalui SIMBG secara online, tanpa bantuan calo/jaksa atau pejabat sekretariat SIMBG sendiri: Dengan menyampaikan PBG dan SLF, Anda memahami instruksi yang terdapat dalam SIMBG"

"Pengunggah berkas pengalihan PBG dan SLF ada indikasi kekurangan yang perlu/belum diperbaiki; ada saran perbaikan pelayanan izin mendirikan bangunan SIMBG? Seharusnya seperti panduan di OSS, pelayanan PUPR Pengambil Keputusan Kota Madiun: Dengan adanya Undang-undang 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung, perizinan dipermudah dan cepat sehingga memudahkan usaha. Dan SIMBG harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan Tata Tertib Pelaksanaan SOP TPA dan SIMBG yaitu Draft Raperda Penataan Bangunan Gedung (pending) SIMBG Kota Madiun telah disusun.

Struktur Birokrasi

"Struktur mengacu pada jumlah cara di mana organisasi membagi pekerjaannya menjadi tugas-tugas yang berbeda dan kemudian mengkoordinasikannya bersama" (Hodge, Athony, dan Gales (1996: 32)). Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas kerja dibagi, dikelompokkan secara formal dan dikoordinasikan: (Robin 2001:43). Pada dasarnya struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai elemen organisasi agar organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien (Purwanto, 2012). Dalam struktur birokrasi pelayanan SIMBG, sudah terdapat implementasi kebijakan SIMBG di Kota Madiun dan Kabupaten Gresik yaitu Tim Sekretariat SIMBG, Tim Pakar (TPA), TPA sesuai Tabel 1, struktur TPA dan TPT melalui Pemerintah. Struktur birokrasi ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan SIMBG, khususnya rekomendasi PBG dan SLF dari Dinas Teknik Sipil yang menggunakan TPA untuk bangunan minimal 2 lantai dan TPT untuk bangunan sederhana (Simanjuntak & Budiman, 2019).

Sumberdaya SDM

Senyampang dengan pernyataan Edward III (1980) bahwa kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada sumber daya manusia. Pernyataan Edward III (1980, 53) menyatakan bahwa "mungkin sumber daya terpenting dalam angkatan kerja polisi" haruslah sumber daya manusia (staf) dalam jumlah yang cukup dan berkualitas (kompetensi) (Edward III, 1980). Implementasi SIMBG meliputi TPA terkait PBG dan SLF untuk bangunan kompleks (BG lebih dari 5 lantai). Bagaimana cara mengunduh apa?; Jasa bangunan (PBG dan SLF) diutamakan via (offline) atau online via SIMBG atau kombinasi offline dan online (hybrid)? "Jaringan tidak masalah, kalau diperbaiki/dicek sistemnya tidak harus di

kantor PTSP.” - Saudara-saudara, apakah kebijakan dan anggaran TPA akan dirumuskan? TPA akan diundang untuk commissioning untuk inspeksi teknis(Situngkir, 2021)”.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu adanya perangkat yang menguasai kompetensi pelayanan publik dan kompetensi administrasi publik (Johannes, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, *device knowledge* yang baik sangat cocok untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana *device knowledge* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan public (Setiadi, 2018). Dari sudut pandang normatif, diketahui bahwa baik pusat maupun daerah memiliki kekuatan negara untuk meningkatkan kompetensi mesin, dan bahwa kompetensi mesin memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi publik (Prasetia, 2019).

Disposisi

Implementasi Disposisi menurut teori Edward III (1980) dan Van Meter dan Van Meter Horn (1975) berdampak besar pada implementasi kebijakan yaitu implementasi layanan SIMBG. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau persetujuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, 1980; 53). Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana jika tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980: 11) (Widodo, 2010).

Kepala Dinas PUPR Kota Madiun menjelaskan, sistem pelayanan SIMBG dilaksanakan melalui sistem hybrid yang menggabungkan dua layanan, sistem online dan offline. Sistem offline diluncurkan agar calon yang mengalami kesulitan secara online dibantu oleh klinik Sekretariat SIMBG dalam pengajuan pendaftaran di SIMBG dan yang mengalami kesulitan pendaftaran secara digital. Pemohon ditawarkan bantuan dan kemudahan dalam mengelola SLF karena tidak ada biaya yang dikenakan untuk menggambar bangunan. Sosialisasi SIMBG sering dilakukan baik dengan DPMPTSP maupun secara sendiri-sendiri, menasar unsur SIMBG, PBG, dan SLF publik dan swasta. (Tasyah et al., 2021). Di sektor publik, faktor penghambat implementasi e-government adalah faktor sosial dan teknologi (Al-Shboul, 2014). Lokasi terpencil menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan sistem e-gov membutuhkan anggaran yang besar, misalnya biaya. untuk komputer, jaringan, hubungan masyarakat dan pelatihan karyawan, dan keperluan lainnya. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan tidak hanya untuk sumberdaya sarana dan prasarana saja, namun anggaran tersebut juga digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan administrasi elektronik itu sendiri (Sukmana, 2022; Tasyah et al., 2021)

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penyusunan dan pemrosesan rencana peraturan daerah pembalasan PBG menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kota Madiun. Hambatan pelaksanaan SIMBG harus diselesaikan dalam penggunaan pemohon; Permohonan PBG dan SLF diselesaikan dengan cepat karena penerbitan PBG dan SLF terus tertinggal dari pemerintah administratif dan kota lainnya di Jawa

Timur; Permohonan online dan offline dipertimbangkan untuk penerbitan PBG dan SLF, dan membangun tempat bukanlah halangan untuk mengirimkan permohonan melalui SIMBG. Dengan memberikan layanan SIMBG kepada kandidat secara hybrid, memberikan kemudahan bagi kandidat yang kurang memiliki keterampilan IT; Meningkatkan kapasitas organisasi dengan meningkatkan koordinasi, komunikasi, sumber daya manusia, birokrasi dan penyampaian layanan SIMBG.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti mengapresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Universitas Terbuka LPPM membiayai dalam penelitian ini, dengan surat perjanjian komitmen penelitian tahun anggaran nomor: B/395/UN31.LPPM/PT.01.03/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Daftar Pustaka

- Bambang Istianto. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam perspektif Pelayanan Publik* (edisi 2).
- Bungin, B. (2020). *Post Kualitatif Sosial Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivisme-Postpositivisme-Phenomenology-Postmodern* (cetakan ke). KENCANA.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fajri, R., & Arnie, R. (2015). Model Sistem Informasi Pencatatan Pengembangan Bangunan Gedung. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 11(1).
- Ismail, I. N. (2021). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Dalam Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di...*
- Marom, A. (2021). *Performance Analysis of IMB (Building Permit) Licensing Services in the Capital Investment Service and Integrated Service of One Door and Labor of Pekalongan Regency*. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304734>
- Maynard-Moody, Dennis Palumbo, Michael Musheno, S. (1990). *Street-Wise Social Police: Resolving the Dilemma of Street -Level Influence and Successful Implementation*. The Western Political Quaterly.
- Monjoy, L. O. (Jr) dan R. (1984). *Interorganizational Policy Implementation: A Theoretical Perspective*. 44 no 6, 491–503.
- Pradana, M. (2016). Perencanaan Skema Sistem Informasi Untuk Aktivitas Manajemen. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 65–71. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i1.155>
- Prasetia, E. H. (2019). Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. *Jurist-Diction*, 2(6), 2079. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15944>
- Purnamasari, H. (2020). *Efektivitas Pelayanan Publik Pemberian Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota...*
- Purwanto, D. R. dan E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia* (I). Penerbit Gaya Media.

- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Raziqin, K., Faradila, S., & Malang, U. M. (n.d.). *Open Government Pemerintah Kota Malang*. 399–422.
- Riau, D. P., & Yuswadi, H. (2014). Improvement Strategy Policy Implementation The Certificate of Building Operability in Probolinggo City. *International Journal of Management and Administrative Sciences*, 3(09), 37–47.
- Riau, D. W. I. P., Harta, R., & Diana, B. A. (2022). *Increasing the Role of the Front Guard in Building Licensing Services in the Building Management Information System*. 28, 1–10.
- Sari, M. (2020). E-Government Dalam Smart City Menuju Effective Accountability Dan Well-Being (Studi pada Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Setiadi, A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Management Review*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1797>
- Simanjuntak, M. R. A., & Budiman, D. (2019). *Manlian Ronald. A. Simanjuntak, Dedi Budiman*. 28, 285–291.
- Situngkir, R. (2021). *ISSN ONLINE: 2745-8369 Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 2, 664–672.
- Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Jember, U. (2022). *Kualitas pelayanan persetujuan bangunan gedung melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung kabupaten banyuwangi*.
- Sugiarta, I. N. G., Agung, I. G., Gita, A., Dinar, P., Made, I., & Mantara, A. (2021). *Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar*. 15, 116–121.
- Sukmana, E. (2022). Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat Berbasis Websitedi Era Pandemi di Kabupaten Sumedang. *Jisipol*, 6(2), 66–98.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Tjiptono, F. (1997). *Perinsip-perinsip Total Quality Service*.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Nusa Creative.
- Zukhri, & Putranto, R. D. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 228–234. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/337>